**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan dipercaya sebagai alat strategis meningkatkan taraf hidup manusia. Sebagaimana disampaikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, berbunyi bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Sementara, Iskandar (2009:141) mengatakan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu aspek kehidupan yang sanggat mendasar bagi pembangunan bangsa suatu Negara. Artinya pendidikan sebagai suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang berfungsi untuk kehidupan bermasyarakat.

Melalui pendidikan kemampuan manusia terus diasah agar menjadi lebih baik serta memiliki ketajaman dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan, karena pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Delor dalam Engkoswara dan Komariah (2015:6) yang menekankan:

Pentingnya empat pilar yang harus dilakukan dalam semua proses pendidikan, yaitu belajar untuk mengetahui *(learning to know*), belajar untuk berbuat *(learning to do*), belajar untuk mandiri (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bersama (*learning to live together*).

Dengan kata lain manusia yang diharapkan mampu menghadapi masa depan adalah manusia yang memiliki cakrawala berpikir luas dan dalam, memiliki keterampilan tepat guna, memiliki kepribadian mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap orang lain. Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai “*agen of change*”, bertugas untuk membangun peserta didik agar sanggup memecahkan masalah nasional *(internal*) dan memenangkan persaingan internasional (*eksternal)*.

Penyelenggaraan sekolah harus diorientasikan pada pembentukan manusia yang kompeten dan beradab (Tim Dosen Adpen UPI, 2014:289). Artinya Sekolah sebagai lembaga formal yang memberikan pengajaran kepada murid- muridnya, tentunya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar.

Adapun salah satu yang mempengaruhi kelancaran kegiatan belajar mengajar adalah sarana prasarana sekolah yang juga menjadi bagian Standar Pendidikan Nasional. Delapan Standar Pendidikan Nasional yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 BAB XII Pasal 45 tentang Sarana Prasarana Pendidikan berbunyi Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial dan emosional serta kejiwaan peserta didik.

Agar sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah berfungsi optimal dalam mendukung pembelajaran di sekolah, diperlukan warga sekolah (kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi) yang memahami dan mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara professional.

Maka dari itu perlu adanya kegiatan manajemen yang menjadi kunci sukses untuk menentukan kelancaran kinerja suatu organisasi seperti halnya disampaikan oleh Matin dan Fuad (2016:3) dalam perspektif pemerintah, kegiatan manajemen sarana prasarana pendidikan setidak- tidaknya memiliki delapan mata rantai kegiatan yaitu: 1) perencanaan, 2) pengadaan, 3) penyaluran, 4) penyimpanan, 5) pemeliharaan, 6) pendayagunaan, 7) inventarisasi, dan 8) penghapusan sarana prasarana di sekolah.

Untuk ketertiban administrasi barang, penghematan keuangan, dan mempermudah dalam pemeliharaan serta pengawasan maka perlu pengendalian barang dengan cara melakukan inventarisasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dapat dipahami bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang. Sesuai peraturan tersebut maka perlu adanya pelaksanaan inventarisasi yang baik dan benar.

Pelaksanaan inventarisasi diperlukan untuk mencatat barang milik/kekayaan negara, untuk menyediakan berbagai informasi berkaitan dengan keberadaan barang, sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen barang, seperti pengadaan, distribusi, ataupun penghapusan barang.

Melalui inventarisasi dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, harga dan sebagainya. Khususnya untuk sarana prasarana yang berasal dari pemerintah, barang milik Negara wajib diiventarisasi dengan format- format yang telah ditentukan. Atau mencatat semua barang inventariasasinya di dalam buku golongan inventaris. Lalu adanya penggolongan klasifikasi dan pemberian kode barang untuk kelancaran tugas, sekaligus membuat sistem kerja menjadi lebih efektif dalam pencarian barang.

Sebaiknya sebelum sarana prasarana digunakan telah dilakukan inventarisasi begitu pula setelah penggunaan sarana prasarana juga dilakukan inventarisasi sebagai bahan laporan. Laporan tersebut dapat dijadikan gambaran tentang apakah sarana prasarana tersebut terpelihara dengan baik atau tidak. Namun pelaksanaan inventarisasi ini tidak akan mampu terlaksana dengan baik jika tanpa pengawasan. Yang mana pengawasan ini sanggat berperan dalam hal pengontrolan sistem kerja pengelola inventarisasi.

Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktifitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktifitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2014:219).

Berdasarkan hasil observasi pada saat PLP- AP maret - Mei 2018, SMA Negeri 2 Kota Jambi merupakan salah satu sekolah yang belum sepenuhnya melaksanakan proses inventarisasi barang sesuai dengan tahapan yang seharusnya. Masih ditemukan beberapa sarana prasarana di sekolah yang belum diberi kode barang inventaris, barangnya ada tetapi tidak termasuk dalam buku inventarisasi, begitupun sebaliknya barangnya ada dibuku inventarisasi namun kondisi barangnya tidak ada, dan klasifikasi penempatan barang lama belum berada dalam satu tempat.

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait “Analisis Pengawasan Inventarisasi di SMA Negeri 2 Kota Jambi.”

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan antara lain:

1. Pelaksanaan inventarisasi di SMA Ngeri 2 kota jambi belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang ada.
2. Belum adanya jadwal tertentu untuk sistem evaluasi inventarisasi.
3. Belum semua barang inventaris di SMA Negeri 2 Kota Jambi diberi kode barang inventaris.
4. Belum adanya pengklasifikasian dan penempatan barang inventaris ke dalam satu tempat khusus.
   1. **Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penelitian difokuskan dan dibatasi pada:

1. Bagaimana proses pelaksanaan inventarisasi di SMA Negeri 2 Kota Jambi?
2. Bagaimana pengawasan inventarisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah di SMA Negeri 2 Kota Jambi?
3. Kendala apa saja yang ditemukan selama pelaksanaan pengawasan inventarisasi di SMA Negeri 2 Kota Jambi?
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adah:

1. Untuk mengetahui proses inventarisasi di SMA Negeri 2 Kota Jambi.
2. Mendeskripsikan Pengawasan Inventarisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah di SMA Negeri 2 Kota Jambi.
3. Mendeskripsikan Kendala yang di temukan selama pelaksanaan pengawasan inventarisasi di SMA Negeri 2 Kota Jambi
   1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis dan praktis serta dapat menjadi bahan rekomendasi bagi SMA Negeri 2 Kota Jambi.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang analisis pengawasan inventarisasi, dapat dijadikan masukan dan referensi khususnya SMA Negeri 2 Kota Jambi serta referensi bagi peneliti berikutnya apabila melakukan penelitian terkait dengan analisis pengawasan inventarisasi.

1. Manfaat Praktis
   1. Bagi SMA Negeri 2 Kota Jambi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemegang kebijakan strategis di SMA Negeri 2 Kota Jambi untuk perbaikan analisis pengawasan inventarisasi selanjutnya.

* 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan peneliti yang lebih luas tentang analisis pengawasan inventarisasi, dengan harapan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta dapat ikut menyumbangkan pemikiran untuk SMA Negeri 2 Kota Jambi.